



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS JENDERAL**
3. NHK : **194878**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 12.851.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m²/75 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Bangunan Seluas 10 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. Bangunan Seluas 10 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Bangunan Seluas 10 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
5. Bangunan Seluas 32.51 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 457 m²/300 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 5.496.000.000
7. Bangunan Seluas 98.5 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
8. Tanah Seluas 900 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 448.230.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000



3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp.	
207.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	
220.230.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	513.490.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	5.312.739
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.840.359.114
F. HARTA LAINNYA	Rp.	230.058.980
Sub Total	Rp.	17.888.450.833
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.888.450.833

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.